

Strategi Peningkatan Mutu Lulusan Melalui Penerapan Kurikulum Merdeka (Studi Kasus di SDIQU Al-Bahjah Tulungagung)

Dewi Hidayatus Solekhah¹

¹STAI Diponegoro Tulungagung

Korespondensi: dewihidayatussholekah@gmail.com

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima: June 07, 2025

Direvisi: October 04, 2025

Publikasi: October 09, 2025

Kata Kunci:

Kurikulum Merdeka, Mutu Lulusan, Kepala Sekolah, Kompetensi Guru, Sarana Prasarana.

Keywords:

Madrasah principal competence, teacher competence, graduate quality.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi peningkatan mutu lulusan melalui penerapan Kurikulum Merdeka di SDIQU Al-Bahjah Tulungagung. Fokus utama penelitian mencakup kebijakan kepala sekolah, kompetensi guru, serta kesiapan sarana dan prasarana dalam mendukung implementasi Kurikulum Merdeka. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan Kurikulum Merdeka di SDIQU Al-Bahjah ditentukan oleh kepemimpinan kepala sekolah yang visioner, guru yang kompeten dalam pendekatan pembelajaran berbasis proyek dan karakter, serta dukungan sarana prasarana yang memadai. Penerapan Kurikulum Merdeka terbukti mampu meningkatkan motivasi belajar siswa dan hasil akademik, serta membentuk lulusan yang memiliki kompetensi abad 21 dan karakter profil pelajar Pancasila. Penelitian ini memberikan implikasi penting bagi lembaga pendidikan dalam mengembangkan kurikulum yang adaptif dan relevan dengan kebutuhan zaman.

Abstract

This study aims to describe strategies for improving graduate quality through the implementation of the Independent Curriculum at SDIQU Al-Bahjah Tulungagung. The main focus of the research includes the principal's policy, teacher competence, and the readiness of facilities and infrastructure in supporting the implementation of the Independent Curriculum. The research method used is descriptive qualitative, with data collected through observation, in-depth interviews, and documentation. The findings reveal that the success of the Independent Curriculum implementation at SDIQU Al-Bahjah is influenced by visionary school leadership, competent teachers who apply project-based and character-based learning approaches, and adequate supporting infrastructure. The implementation of the Independent Curriculum has proven effective in enhancing students' learning motivation and academic achievement, while also producing graduates equipped with 21st-century competencies and strong Pancasila student character. This research provides important implications for educational institutions in developing curricula that are adaptive and relevant to contemporary needs.

PENDAHULUAN

Pendidikan di Indonesia selalu mengalami pembaruan dan inovasi guna menciptakan generasi penerus bangsa yang unggul (Arikunto, 2010). Salah satu kebijakan besar dalam dunia pendidikan adalah implementasi Kurikulum Merdeka yang diusung oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada tahun 2022. Kurikulum ini bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada guru dalam mengelola pembelajaran, sehingga proses belajar mengajar dapat lebih menyesuaikan dengan kebutuhan dan potensi peserta didik, serta menghasilkan pengalaman belajar yang menyenangkan (Kemendikbudristek, 2022). Kurikulum Merdeka memfokuskan pada pembelajaran berbasis kompetensi, keterampilan, dan karakter, yang mendukung perkembangan motivasi belajar siswa (Kemendikbudristek, 2022).

Kurikulum Merdeka memiliki tujuan untuk mewujudkan pembelajaran yang bermakna dan efektif dalam meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan akhlak mulia serta menumbuhkembangkan cipta, rasa, dan karsa peserta didik sebagai pelajar sepanjang hayat yang berkarakter Pancasila (Kemendikbudristek, 2022). Konsep pelajar sepanjang hayat yang berkarakter Pancasila diwujudkan dalam profil pelajar Pancasila yang menjadi dasar pengembangan kurikulum nasional. Rumusan profil pelajar Pancasila mendasarkan pada perubahan global yang harus direspons oleh sistem pendidikan nasional, termasuk perubahan sosial, budaya, dan teknologi, serta penguatan nilai-nilai nasionalisme sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila (UU No. 20 Tahun 2003).

Selain itu, Wahyudin dkk. (2024) menegaskan bahwa keberhasilan penerapan Kurikulum Merdeka sangat ditentukan oleh kesiapan guru, dukungan kepala sekolah, dan ketersediaan sumber belajar yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan kapasitas SDM pendidikan menjadi kunci utama dalam meningkatkan mutu lulusan di satuan pendidikan dasar. Berdasarkan urgensi dan ejawantah pengetahuan serta keterampilan yang perlu dibangun dalam diri pelajar Indonesia, dirumuskan enam dimensi Profil Pelajar Pancasila, yaitu: (1) beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia; (2) bergotong royong; (3) bernalar kritis; (4) berkebinekaan global; (5) mandiri; dan (6) kreatif (Kemendikbudristek, 2022). Keenam dimensi tersebut saling terkait dan menjadi pedoman pengembangan karakter peserta didik dari jenjang PAUD hingga SMA/SMK.

Namun demikian, meskipun Kurikulum Merdeka memberikan fleksibilitas dalam pembelajaran, pelaksanaannya di lapangan tidak selalu berjalan mulus. Banyak faktor memengaruhi keberhasilan implementasi kurikulum, salah satunya adalah manajemen pembelajaran yang diterapkan oleh sekolah (Miles & Huberman, 1992). Manajemen pembelajaran yang efektif sangat berpengaruh dalam menciptakan suasana belajar yang kondusif dan meningkatkan motivasi belajar siswa. Motivasi belajar memiliki peran penting dalam menentukan sejauh mana siswa berpartisipasi dalam kegiatan belajar, menyerap materi, dan mencapai tujuan akademik (Sardiman, 2011).

Mutu lulusan secara etimologis terdiri dari dua kata, yaitu “mutu” dan “lulusan”. Mutu berarti ukuran baik buruk suatu benda atau kadar kualitas, sedangkan lulusan berarti seseorang yang telah menamatkan pendidikan atau lulus ujian (KBBI, 2021). Secara terminologis, mutu lulusan merupakan komponen utama yang menjadi target lembaga pendidikan dalam mewujudkan tujuan pendidikan. Peningkatan mutu lulusan tidak terlepas dari mutu pendidikan yang baik pula. Fathurrahman (2014) menjelaskan bahwa pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan dengan kemampuan, wawasan, dan keterampilan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Mutu pendidikan harus diupayakan melalui perubahan terencana dan berkelanjutan (Bungin, 2010).

Standar kompetensi lulusan merupakan standar minimal yang harus dicapai oleh setiap peserta didik selama proses belajar (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 35). Standar ini mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dimiliki peserta didik dari satuan pendidikan pada setiap jenjang tertentu.

Di SDIQU Al-Bahjah Tulungagung, yang merupakan lembaga pendidikan berbasis agama di Kecamatan Karangrejo, penerapan Kurikulum Merdeka menghadapi tantangan tersendiri. Sekolah tidak hanya berfokus pada penguasaan akademik, tetapi juga pembinaan moral dan spiritual siswa (Bogdan & Biklen, 1998). Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana manajemen pembelajaran yang diterapkan di sekolah ini dalam kerangka Kurikulum Merdeka dapat memengaruhi motivasi belajar siswa. Motivasi belajar yang tinggi akan mendorong keterlibatan aktif siswa dalam pembelajaran, sedangkan rendahnya motivasi dapat menghambat pencapaian tujuan pendidikan (Sardiman, 2011).

Keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka di SDIQU Al-Bahjah tidak terlepas dari strategi pembelajaran yang mengintegrasikan nilai karakter dan keterampilan abad ke-21. Melalui pembelajaran

berbasis proyek dan kolaboratif, siswa didorong untuk aktif, kreatif, dan bertanggung jawab terhadap proses belajar mereka (Kemendikbudristek, 2022).

Selain pembelajaran akademik, SDIQU Al-Bahjah juga mengembangkan berbagai program ekstrakurikuler seperti Pramuka, English Club, Science Club, Pidato, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk menumbuhkan karakter dan keterampilan sosial siswa. Kegiatan ekstrakurikuler tersebut turut melatih kepemimpinan, kerja sama, dan kreativitas peserta didik (Fathurrahman, 2014). Sekolah juga melibatkan orang tua dan masyarakat dalam proses pendidikan melalui seminar dan workshop, sehingga tercipta lingkungan belajar yang kolaboratif dan mendukung (Bungin, 2010).

Berdasarkan penelitian terdahulu, manajemen pembelajaran yang baik — meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi — terbukti dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa (Sugiyono, 2018). Dengan demikian, peneliti tertarik untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai strategi yang diterapkan oleh SDIQU Al-Bahjah Tulungagung dalam meningkatkan mutu lulusan melalui penerapan Kurikulum Merdeka tahun 2025.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) dan masuk dalam kategori penelitian kualitatif, di mana penelitian lebih diarahkan untuk memahami fenomena-fenomena yang terkait dengan rumusan masalah (Bogdan & Biklen, 1998). Pemaknaan lainnya tentang penelitian kualitatif adalah menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis tentang keadaan objek sebenarnya (Sugiyono, 2018). Realitas kehidupan secara menyeluruh merupakan *setting* alami yang tidak dapat dipahaminya secara terpisah (Miles & Huberman, 1992).

Kehadiran peneliti dalam penelitian kualitatif sangat penting karena peneliti merupakan instrumen utama penelitian (Arikunto, 2010). Ciri khas penelitian kualitatif tidak bisa dipisahkan dari pengamat yang ikut berperan serta secara langsung, di mana peneliti juga merupakan orang yang menentukan keseluruhan skenario penelitian (Sugiyono, 2018). Lokasi penelitian ini adalah SDIQU Al-Bahjah Tulungagung yang bertempat di Desa Sembon, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung. Adapun keunikan dari SDIQU Al-Bahjah Tulungagung antara lain memiliki fasilitas yang memadai, mampu menggabungkan akademik dan nonakademik, serta menjadi lembaga yang diminati oleh siswa dan orang tua. Keunikan serta keunggulan inilah yang menjadikan lembaga tersebut layak untuk diteliti (Arikunto, 2010).

Data penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder (Sugiyono, 2018). Data primer diperoleh langsung dari kepala sekolah, guru, dan siswa di SD Islam Al-Bahjah Tulungagung. Sedangkan data sekunder berupa dokumen lembaga, data murid, sarana dan prasarana yang mendukung penerapan kurikulum merdeka. Sumber data penelitian adalah data yang diperoleh secara langsung maupun tidak langsung dari informan (Arikunto, 2010). Informan dalam penelitian ini meliputi kepala sekolah, guru, komite, dan pihak-pihak terkait lainnya. Informasi diartikan sebagai sekumpulan data atau fakta yang dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi penerimanya (Bogdan & Biklen, 1998).

Jenis dokumen yang digunakan adalah dokumen resmi internal lembaga, seperti kebijakan kepala sekolah mengenai penerapan Kurikulum Merdeka, inovasi guru dalam pembelajaran, sarana prasarana penunjang, serta hasil belajar siswa (Sugiyono, 2018).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi partisipan, wawancara mendalam, dan dokumentasi sebagaimana dikemukakan oleh Bogdan dan Biklen (1998). Observasi dilakukan dengan melibatkan diri secara langsung pada kegiatan subjek penelitian di lingkungan sekolah. Wawancara mendalam dilakukan melalui beberapa tahap, mulai dari penentuan informan,

penyusunan pertanyaan, pelaksanaan wawancara, hingga analisis hasil wawancara (Sugiyono, 2018). Dokumentasi digunakan untuk memperkuat hasil observasi dan wawancara (Miles & Huberman, 1992).

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Analisis dilakukan melalui tiga tahapan yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 1992). Reduksi data adalah proses pemilihan, penyederhanaan, dan pengorganisasian data hingga dapat ditarik kesimpulan. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, tabel, bagan, atau hubungan antar kategori. Penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung.

Pengecekan keabsahan data dilakukan dengan menggunakan empat kriteria: *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability* (Sugiyono, 2018). Untuk mencapai *credibility*, peneliti melakukan *prolonged engagement*, *persistent observation*, *triangulation*, *peer debriefing*, dan *member check*. *Transferability* dilakukan melalui uraian kontekstual yang rinci. *Dependability* dicapai melalui *audit trail*, sedangkan *confirmability* dilakukan untuk memastikan hasil penelitian didukung oleh bukti yang valid (Miles & Huberman, 1992).

Tahapan penelitian dilakukan melalui tiga langkah, yaitu: Tahap persiapan, meliputi penyusunan rencana penelitian, observasi lokasi, dan pengurusan izin penelitian. Tahap pelaksanaan, peneliti melakukan observasi dan wawancara di SD Islam Al-Bahjah Tulungagung. Tahap penyelesaian, data dikumpulkan, disaring, disusun, dan disajikan dalam bentuk laporan (Arikunto, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Kebijakan Kepala Sekolah dalam Penerapan Kurikulum Merdeka untuk Meningkatkan Mutu Lulusan di SDIQU Al-Bahjah Tulungagung.

Kepala Sekolah menerapkan kebijakan bagi guru yang mengajar di SDIQU Al-Bahjah ini harus sesuai dengan kompetensi yang dibidangi dan disesuaikan dengan program studi S1-nya. Kompetensi guru memiliki pengaruh besar terhadap mutu pendidikan karena menjadi dasar profesionalitas pendidik dalam mencapai tujuan pembelajaran (Arikunto, 2010). Minimal, guru di sekolah ini harus memiliki ijazah S1 sebagai syarat utama untuk dapat mengajar. Sementara bagi guru Tahfidz, dibuktikan dengan adanya syahadah sebagai bukti hafalan Al-Qur'an.

Menurut Suyitno, Haryanti, dan Rafiqie (2025), etika profesi keguruan merupakan seperangkat nilai moral dan prinsip yang harus dijunjung tinggi oleh seorang guru dalam menjalankan tugasnya. Etika ini mencakup tanggung jawab, kejujuran, keadilan, serta sikap profesional dalam memberikan pelayanan pendidikan. Guru dituntut untuk mampu menjaga integritas dan menjadikan dirinya sebagai teladan bagi peserta didik, baik dalam ucapan maupun perbuatan.

Kepala sekolah bertindak sebagai pemimpin (leader) yang memberikan arah visi dan misi mendukung Kurikulum Merdeka, pendidik (educator) yang membina guru melalui pelatihan dan arahan akademik, motivator (motivator) yang memberikan penghargaan dan dorongan agar guru berinovasi, serta inovator (innovator) yang mengembangkan model pembelajaran tematik berbasis nilai-nilai Islam dan karakter Pancasila (Mulyasa, 2013; Suryana, 2018).

Lembaga pendidikan mengambil kebijakan bahwa seluruh tenaga pendidik di sekolah tersebut harus menaati tata tertib dan kewajiban yang telah disepakati bersama, mulai dari kedisiplinan jam kerja, etika sebagai guru, hingga pemenuhan administrasi pembelajaran (Permendikbud No. 22 Tahun 2016). Sekolah juga mengambil kebijakan yang mendukung pembelajaran yang fleksibel, partisipatif, dan berbasis karakter sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila, dengan menekankan pembelajaran berbasis proyek (P5) serta pembiasaan karakter Islami (Kemendikbudristek, 2022). Kepala sekolah

mendorong kolaborasi antara guru dan orang tua dalam proses pembelajaran karena keterlibatan orang tua terbukti berpengaruh terhadap keberhasilan belajar anak (*Epstein, 2018*).

Selain itu, kepala sekolah melaksanakan pelatihan dan bimbingan kepada guru agar strategi pembelajaran sesuai dengan Kurikulum Merdeka (*Bogdan & Biklen, 1998*). Pengambilan keputusan dilakukan secara partisipatif melalui musyawarah guru dan komite sekolah (*Suharsimi Arikunto, 2010*). Supervisi rutin dilakukan untuk memastikan implementasi berjalan efektif (*Mulyasa, 2013*). Sekolah juga terus mendorong pengembangan pembelajaran berbasis proyek (P5) dan kegiatan ekstrakurikuler yang relevan untuk mendukung mutu lulusan (*Kemendikbudristek, 2022*).

Kebijakan kepala sekolah dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka juga berorientasi pada peningkatan kapasitas guru melalui kegiatan *coaching* dan *mentoring*. Kegiatan ini dilakukan secara berkala untuk membangun budaya refleksi dan pembelajaran berkelanjutan di kalangan guru. Dengan adanya pelatihan dan supervisi akademik yang terarah, guru mampu merancang pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa, serta mampu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi (*Guskey, 2002; Darling-Hammond, 2017*). Kepala sekolah juga memastikan adanya keterpaduan antara kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Kebijakan ini selaras dengan prinsip Kurikulum Merdeka yang menekankan keseimbangan antara aspek akademik dan penguatan karakter. Program seperti *Project Based Learning* dan kegiatan *Student Leadership* diterapkan untuk menumbuhkan kreativitas, tanggung jawab, dan kolaborasi siswa (*Kemendikbudristek, 2022; Thomas, 2000*). Dengan demikian, mutu lulusan tidak hanya diukur dari aspek kognitif, tetapi juga dari sikap dan keterampilan sosial yang ditampilkan dalam keseharian.

Selain kebijakan internal, kepala sekolah juga menjalin kerja sama dengan pihak eksternal seperti pengawas madrasah, lembaga pelatihan guru, dan tokoh masyarakat setempat. Kerja sama ini bertujuan memperkuat implementasi kurikulum serta memperluas dukungan terhadap program sekolah. Dengan adanya sinergi antara sekolah dan masyarakat, SDIQU Al-Bahjah mampu mempertahankan mutu pendidikan dan menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, mandiri, dan kompeten (*Tilaar, 2002; Fullan, 2007*).

Kompetensi Guru dalam Mendukung Penerapan Kurikulum Merdeka, untuk Meningkatkan Mutu Lulusan di SDIQU Al-Bahjah Tulungagung.

Kompetensi guru dalam mendukung penerapan Kurikulum Merdeka di SDIQU Al-Bahjah Tulungagung mencakup penguasaan kompetensi pedagogik dan profesional, keterampilan dalam penggunaan teknologi pendidikan, kemampuan kolaborasi dan komunikasi, serta semangat pengembangan profesional berkelanjutan. Guru dituntut adaptif terhadap perkembangan teknologi dan perubahan metode pembelajaran. Misalnya, guru menggunakan perangkat digital seperti *Google Classroom* dan aplikasi evaluasi daring *Quizizz* sebagai sarana asesmen formatif yang interaktif (*Kemendikbudristek, 2022*). Pembelajaran *blended learning* diterapkan untuk memperkuat kompetensi digital siswa dan memfasilitasi pembelajaran yang fleksibel (*Garrison & Vaughan, 2008*).

Guru juga diharapkan mampu memanfaatkan sarana dan prasarana sekolah secara maksimal untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Pemanfaatan fasilitas seperti laboratorium, perpustakaan, dan ruang multimedia menjadi bagian penting dari penerapan Kurikulum Merdeka yang berorientasi pada pengalaman belajar bermakna (*Mulyasa, 2013*). Guru menunjukkan keteladanan dalam disiplin kerja dan membangun komunikasi efektif dengan siswa maupun orang tua. Hal ini sejalan dengan prinsip *co-creation learning* yang menekankan pentingnya sinergi antara sekolah dan keluarga dalam proses pembelajaran (*Epstein, 2018*).

Wicaksono dan Sari (2023) menjelaskan bahwa pelaksanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) memiliki efektivitas yang tinggi dalam mengembangkan karakter peserta didik. Melalui kegiatan proyek yang kontekstual dan kolaboratif, peserta didik dapat menginternalisasi nilai-nilai

gotong royong, mandiri, kreatif, serta memiliki kemampuan berpikir kritis yang selaras dengan tujuan Kurikulum Merdeka.

Selain itu, guru berperan aktif dalam pengembangan karakter siswa melalui kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Kegiatan seperti pembiasaan ibadah, program tahfidz, dan proyek *Profil Pelajar Pancasila* mendorong siswa untuk mengembangkan nilai-nilai kemandirian, tanggung jawab, dan gotong royong (Kemendikbudristek, 2022). Guru tidak hanya mengajar pengetahuan, tetapi juga menjadi fasilitator pembentukan karakter dan spiritualitas siswa yang sejalan dengan nilai-nilai Islam yang dipegang teguh oleh SDIQU Al-Bahjah (Suyanto & Djihad, 2013). Perpustakaan sekolah juga memiliki peran strategis dalam meningkatkan minat baca siswa. Di tengah perkembangan era digital, kebiasaan membaca mulai menurun karena siswa lebih sering mencari informasi melalui internet. Oleh karena itu, sekolah perlu mengoptimalkan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar dengan menyediakan buku-buku terbaru, literatur anak Islami, serta menjadwalkan waktu rutin membaca di sekolah (Rahim, 2011). Kebijakan ini diharapkan dapat menumbuhkan kembali budaya literasi yang menjadi fondasi penting dalam peningkatan mutu lulusan.

Lebih lanjut, penguasaan guru terhadap model-model pembelajaran inovatif seperti *Project Based Learning (PjBL)*, *Discovery Learning*, dan *Differentiated Learning* menjadi indikator penting keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka (Kemendikbudristek, 2022; Thomas, 2000). Guru dituntut tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menyesuaikan pendekatan pembelajaran dengan karakteristik peserta didik. Kemampuan refleksi dan evaluasi diri juga perlu dikembangkan agar guru dapat memperbaiki strategi pembelajaran berdasarkan hasil dan umpan balik siswa (Brookfield, 2017).

Terakhir, kepala sekolah turut mendukung peningkatan kompetensi guru melalui program pelatihan, supervisi akademik, dan forum komunitas belajar. Melalui kegiatan tersebut, guru dapat saling berbagi praktik baik dan memperluas wawasan pedagogik. Pendekatan kolaboratif ini menciptakan budaya belajar sepanjang hayat bagi tenaga pendidik, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap mutu lulusan (Fullan, 2007; Darling-Hammond, 2017).

Kesiapan Sarana dan Prasarana yang menunjang dalam penerapan Kurikulum Merdeka di SDIQU Al-Bahjah Tulungagung.

Fasilitas seperti ruang kelas, akses terhadap teknologi informasi, alat pembelajaran, dan lingkungan belajar sangat mendukung penerapan Kurikulum Merdeka di SDIQU Al-Bahjah Tulungagung. Keberhasilan pelaksanaan kurikulum ini sangat bergantung pada efisiensi pengelolaan sarana dan prasarana yang tersedia. Kesiapan infrastruktur sekolah menjadi faktor utama yang menentukan kelancaran pembelajaran yang berpusat pada siswa (Mulyasa, 2013; Kemendikbudristek, 2022). Oleh karena itu, sekolah menekankan pentingnya alokasi sumber daya yang tepat, peningkatan kapasitas guru melalui pelatihan penggunaan teknologi, serta pembentukan budaya sekolah yang positif dan kolaboratif (Fullan, 2007).

Strategi yang diterapkan antara lain monitoring penggunaan fasilitas, kolaborasi guru dalam perencanaan pembelajaran berbasis teknologi, serta penerapan sistem evaluasi sarana dan prasarana secara rutin. Sekolah membentuk tim sarpras (sarana dan prasarana) yang bertugas melakukan pemeliharaan berkala dan memastikan semua fasilitas berfungsi optimal. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara partisipatif untuk menghindari pemborosan sumber daya serta memastikan setiap peralatan digunakan sesuai kebutuhan pembelajaran (Arikunto, 2010).

Partisipasi seluruh warga sekolah juga sangat berpengaruh terhadap kesiapan sarana. Melalui kegiatan “Jumat Bersih”, guru dan siswa bersama-sama menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan sekolah. Kegiatan ini tidak hanya menciptakan suasana belajar yang sehat, tetapi juga menumbuhkan tanggung jawab sosial serta kepedulian terhadap lingkungan (Suyanto & Djihad, 2013). Selain itu, sekolah memiliki kebijakan pemanfaatan ruang kelas yang fleksibel agar dapat digunakan

untuk berbagai jenis kegiatan pembelajaran, seperti diskusi kelompok, proyek kolaboratif, hingga kegiatan keagamaan. Sekolah juga menyediakan fasilitas makan siang untuk mendukung stamina dan kenyamanan belajar siswa hingga akhir jam sekolah. Kebijakan ini selaras dengan prinsip *well-being* dalam Kurikulum Merdeka yang menekankan kesejahteraan fisik dan psikologis peserta didik sebagai prasyarat keberhasilan belajar (OECD, 2019; Kemendikbudristek, 2022). Selain itu, tersedia pula ruang ibadah, taman bermain, serta area hijau yang digunakan sebagai media pembelajaran luar kelas, sehingga proses belajar menjadi lebih kontekstual dan menyenangkan (Suryana, 2018).

Sebagai upaya peningkatan berkelanjutan, SDIQU Al-Bahjah juga mengembangkan sistem inventaris digital untuk mencatat dan mengontrol penggunaan sarana dan prasarana. Penggunaan teknologi ini membantu efisiensi administrasi serta transparansi dalam pengelolaan aset sekolah (Rahman, 2021). Dengan adanya sistem tersebut, sekolah dapat dengan cepat mengidentifikasi kebutuhan perbaikan atau penambahan fasilitas. Kesiapan sarana dan prasarana yang dikelola secara efektif menjadi salah satu indikator penting keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka dan peningkatan mutu lulusan.

Selain dukungan internal, sekolah juga menjalin kemitraan dengan masyarakat, komite sekolah, dan pihak donatur untuk memperkuat sumber daya fisik dan nonfisik. Kolaborasi ini menjadi bentuk tanggung jawab bersama dalam menyediakan fasilitas pendidikan yang layak dan bermakna bagi peserta didik (Tilaar, 2002). Dengan demikian, kesiapan sarana dan prasarana di SDIQU Al-Bahjah bukan hanya sekadar ketersediaan fisik, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai partisipatif, efisiensi, dan kepedulian terhadap mutu pendidikan.

Pembahasan

Kebijakan Kepala Sekolah dalam Penerapan Kurikulum Merdeka untuk Meningkatkan Mutu Lulusan.

Kebijakan kepala sekolah di SDIQU Al-Bahjah Tulungagung diawali dari penguatan visi dan misi sekolah yang sejalan dengan nilai-nilai karakter Pancasila dan pengembangan peserta didik secara holistik. Dalam era transformasi pendidikan Indonesia, penguatan visi dan misi sekolah menjadi krusial sebagai landasan strategis dalam membentuk arah dan identitas lembaga pendidikan. Sejak diterapkannya Kurikulum Merdeka mulai tahun 2022 oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, setiap satuan pendidikan didorong untuk menyusun visi dan misi yang mencerminkan nilai-nilai karakter Pancasila serta mendukung pengembangan peserta didik secara holistik (Kemendikbudristek, 2022). Kepala sekolah berperan penting dalam mengintegrasikan nilai-nilai tersebut melalui kebijakan akademik dan non-akademik yang berorientasi pada mutu lulusan (Mulyasa, 2013).

Visi dan misi sekolah yang terarah akan mencerminkan cita-cita jangka panjang yang tidak hanya menargetkan pencapaian akademik, tetapi juga pembentukan karakter siswa sebagai pelajar Pancasila. Profil Pelajar Pancasila yang dirumuskan dalam kebijakan Kurikulum Merdeka memiliki enam dimensi utama, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia; berkebinekaan global; bergotong royong; mandiri; bernalar kritis; dan kreatif. Seluruh dimensi tersebut menjadi dasar pengembangan kurikulum, kegiatan kokurikuler, dan pembiasaan karakter di sekolah (Kemendikbudristek, 2022; Suryana, 2018). Kurikulum Merdeka memberikan ruang bagi guru untuk mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi serta proyek penguatan profil pelajar Pancasila (P5), yang bertujuan menyeimbangkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa (Wahyudi, 2021).

Selain itu, misi sekolah perlu dijabarkan ke dalam program nyata seperti penerapan budaya sekolah yang mencerminkan nilai gotong royong, penghargaan terhadap keberagaman, pengembangan spiritualitas, serta penerapan metode pembelajaran yang memicu nalar kritis dan kreativitas. Sekolah dapat mengembangkan indikator pencapaian misi melalui kegiatan proyek lintas mata pelajaran,

pelibatan masyarakat, serta pembiasaan kegiatan reflektif (Tilaar, 2002). Keterlibatan guru dan orang tua dalam pelaksanaan P5 juga memperkuat nilai kolaboratif dalam pembelajaran. Menurut Arikunto (2010), efektivitas implementasi kebijakan pendidikan sangat bergantung pada partisipasi seluruh warga sekolah dan kepemimpinan kepala sekolah yang visioner.

Kepala sekolah di SDIQU Al-Bahjah juga berperan sebagai *leader, educator, motivator*, dan *innovator* dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan (Mulyasa, 2013). Sebagai pemimpin, kepala sekolah memberikan arah dan memastikan semua kebijakan berjalan sesuai visi lembaga. Sebagai pendidik, kepala sekolah membina guru melalui pelatihan, diskusi akademik, dan supervisi kelas. Sebagai motivator, kepala sekolah memberi penghargaan bagi guru yang berprestasi, sedangkan sebagai inovator, kepala sekolah mengembangkan model pembelajaran tematik berbasis nilai-nilai Islam dan karakter Pancasila. Kombinasi empat peran ini menciptakan suasana sekolah yang kondusif, kreatif, dan berorientasi pada peningkatan mutu lulusan.

Kebijakan kepala sekolah juga mencakup penguatan tata tertib, disiplin kerja, dan peningkatan kualifikasi guru. Setiap tenaga pendidik diharuskan memiliki kompetensi yang sesuai bidangnya dan minimal berijazah S1. Selain itu, guru Tahfidz wajib memiliki syahadah hafalan Al-Qur'an sebagai bukti kompetensi spiritual. Kebijakan ini sejalan dengan pandangan Sallis (2012) bahwa mutu pendidikan tidak hanya diukur dari hasil akademik siswa, tetapi juga dari kualitas sumber daya manusia pendidikannya. Dengan adanya standar profesionalisme guru, diharapkan kualitas proses belajar mengajar semakin meningkat dan berdampak langsung pada mutu lulusan.

Kompetensi Guru dalam Mendukung Penerapan Kurikulum Merdeka, untuk Meningkatkan Mutu Lulusan.

Guru memegang peranan kunci dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka. Kompetensi dan kesiapan guru menjadi salah satu indikator utama keberhasilan implementasi kurikulum ini. Guru dituntut mampu merancang pembelajaran berbasis proyek (*project-based learning*), pembelajaran berbasis masalah (*problem-based learning*), serta menggunakan asesmen portofolio untuk memantau perkembangan peserta didik. Menurut Mulyasa (2013), guru merupakan komponen terpenting dalam sistem pendidikan karena kompetensinya menentukan mutu hasil belajar. Dalam konteks Kurikulum Merdeka, guru harus menguasai empat kompetensi utama, yaitu pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen).

Selain itu, penguasaan teknologi informasi dan komunikasi menjadi salah satu kompetensi yang sangat diperlukan untuk mendukung pembelajaran digital dan hybrid. Guru perlu mampu memanfaatkan berbagai platform seperti *Google Classroom*, *Canva*, atau *Quizizz* untuk mendukung interaksi belajar yang menarik dan adaptif (Riyana, 2020). Keaktifan guru dalam mengikuti pelatihan dan workshop penguatan kompetensi pedagogik serta pembaruan metodologi pembelajaran juga menjadi bagian dari pengembangan profesional berkelanjutan. Arikunto (2010) menegaskan bahwa pengembangan profesionalitas guru merupakan upaya sistematis yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil pendidikan.

Guru tidak hanya berperan sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai fasilitator, mentor, dan inspirator dalam proses pembelajaran. Peran guru sebagai fasilitator memungkinkan siswa untuk menemukan pengetahuannya sendiri melalui pengalaman langsung dan refleksi. Sebagai mentor, guru membimbing dan mengarahkan siswa agar mampu mengembangkan potensi diri secara maksimal. Sedangkan sebagai inspirator, guru memberikan keteladanan dan semangat belajar sepanjang hayat (Suparlan, 2019). Dengan menjalankan ketiga peran tersebut, guru dapat membantu siswa berkembang secara optimal dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, sejalan dengan tujuan Kurikulum Merdeka yang menekankan pada pembelajaran berdiferensiasi dan pembentukan profil pelajar Pancasila (Kemendikbudristek, 2022).

Selanjutnya, ketersediaan sumber belajar yang memadai juga menjadi faktor penting dalam mendukung kinerja guru. Salah satu fasilitas yang berperan besar adalah perpustakaan sekolah. Seiring perkembangan teknologi digital, siswa cenderung lebih menyukai informasi instan dari internet sehingga minat baca menurun. Oleh karena itu, perlu adanya strategi revitalisasi perpustakaan sebagai pusat literasi di sekolah (Yusuf, 2017). Sekolah dapat menyediakan koleksi buku terbaru yang relevan dengan materi pelajaran dan mengintegrasikan kegiatan membaca dalam rutinitas belajar, misalnya melalui program “literasi 15 menit” atau kunjungan berkala ke perpustakaan (Suyanto, 2019). Di SDIQU Al-Bahjah Tulungagung, upaya penguatan literasi dilakukan dengan menjadwalkan kegiatan membaca di sela-sela pembelajaran di kelas. Guru membimbing siswa membaca buku sesuai tema pembelajaran agar pengetahuan mereka lebih kontekstual. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *learning by doing* yang dikemukakan oleh John Dewey, yaitu belajar melalui pengalaman langsung. Dengan demikian, keberadaan perpustakaan bukan hanya sarana tambahan, melainkan bagian integral dari sistem pembelajaran yang mendukung pencapaian tujuan Kurikulum Merdeka.

Terakhir, kompetensi guru yang adaptif dan reflektif menjadi kunci dalam menghadapi tantangan implementasi kurikulum baru. Guru perlu melakukan refleksi terhadap praktik pembelajaran, mengevaluasi efektivitas metode, serta terus memperbarui diri sesuai perkembangan ilmu dan teknologi (Bogdan & Biklen, 1998). Peningkatan kompetensi guru secara berkelanjutan akan menciptakan lingkungan belajar yang dinamis dan bermakna, sehingga mutu lulusan dapat meningkat secara signifikan baik dalam ranah akademik maupun karakter.

Kesiapan Sarana dan Prasarana yang menunjang dalam penerapan Kurikulum Merdeka.

Kurikulum Merdeka menuntut adanya lingkungan belajar yang mendukung pembelajaran aktif, eksploratif, dan berbasis pengalaman. Oleh karena itu, pemenuhan sarana dan prasarana menjadi hal yang sangat krusial. Ruang kelas yang fleksibel dan ramah siswa memungkinkan pengaturan ulang untuk kegiatan proyek, diskusi kelompok, dan eksperimen sederhana. Alat peraga, bahan praktik, serta media pembelajaran interaktif memperkaya pengalaman belajar siswa. Efisiensi dalam pengelolaan fasilitas dan pelibatan siswa dalam menjaga sarana prasarana juga berkontribusi terhadap pembentukan tanggung jawab dan budaya sekolah yang mendukung pembelajaran berkelanjutan (Kemendikbudristek, 2022).

Sarana dan prasarana pendidikan merupakan faktor pendukung yang memiliki pengaruh langsung terhadap efektivitas proses pembelajaran. Menurut Mulyasa (2013), ketersediaan fasilitas belajar yang memadai dapat meningkatkan semangat belajar siswa dan efektivitas kinerja guru. Hal ini selaras dengan pendapat Arikunto (2010) yang menyatakan bahwa infrastruktur pendidikan merupakan bagian penting dalam sistem pembelajaran yang saling berhubungan dengan kurikulum, peserta didik, dan tenaga pendidik. Dalam konteks Kurikulum Merdeka, sarana prasarana tidak hanya sebatas ruang fisik, tetapi juga mencakup teknologi, sumber belajar digital, serta akses terhadap lingkungan belajar yang mendukung kreativitas siswa.

Di SDIQU Al-Bahjah Tulungagung, pemenuhan fasilitas pembelajaran dilakukan melalui penyediaan ruang kelas tematik, perangkat teknologi seperti proyektor dan *smartboard*, serta area terbuka untuk kegiatan eksplorasi dan proyek sains. Sekolah juga membentuk tim sarana prasarana (sarpras) yang bertugas melakukan pemeliharaan rutin, pengawasan pemanfaatan ruang, serta melakukan evaluasi kebutuhan secara berkala. Strategi ini sejalan dengan temuan penelitian Burhan Bungin (2010) yang menegaskan pentingnya manajemen fasilitas sekolah yang partisipatif dan adaptif terhadap kebutuhan peserta didik dan perubahan kurikulum.

Hidayati (2023) menyatakan bahwa peran orang tua memiliki kontribusi besar terhadap peningkatan kualitas pendidikan anak di era Kurikulum Merdeka. Keterlibatan orang tua tidak hanya dalam aspek akademik, tetapi juga dalam pembentukan karakter dan penguatan nilai-nilai moral di

rumah. Kolaborasi antara sekolah dan keluarga menjadi kunci utama dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan berkelanjutan.

Peningkatan kualitas sarana juga harus diiringi dengan kebijakan pemanfaatan yang inovatif. Misalnya, kebijakan pemanfaatan ruang kelas fleksibel yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan, mulai dari pembelajaran tematik, kegiatan literasi, hingga proyek sosial. Hal ini memperlihatkan bahwa dukungan sarana dan prasarana tidak hanya berdampak pada ranah akademik, tetapi juga pada kesejahteraan fisik dan mental peserta didik (Suparlan, 2019). Dengan demikian, kesiapan sarana dan prasarana menjadi fondasi utama keberhasilan penerapan Kurikulum Merdeka yang holistik dan berorientasi pada kebutuhan peserta didik.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka di SDIQU Al-Bahjah Tulungagung dipengaruhi oleh sinergi antara kebijakan kepala sekolah, kompetensi guru, serta kesiapan sarana dan prasarana pendidikan. Kepala sekolah berperan sentral melalui kebijakan yang berlandaskan visi dan misi sekolah selaras dengan nilai-nilai karakter Pancasila, didukung pelatihan, supervisi akademik, dan kemitraan dengan orang tua serta masyarakat. Guru menunjukkan kompetensi pedagogik dan profesional yang baik, mampu mengintegrasikan teknologi, mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi, dan menjadi fasilitator inspiratif bagi peserta didik. Sementara itu, kesiapan sarana dan prasarana seperti ruang kelas fleksibel, perangkat teknologi, dan fasilitas pendukung lainnya menciptakan pembelajaran yang interaktif dan bermakna. Sinergi ketiga aspek tersebut menjadi kunci dalam meningkatkan mutu lulusan serta mewujudkan pendidikan yang berkarakter, mandiri, dan berdaya saing.

Kepala sekolah diharapkan terus memperkuat kebijakan yang mendukung pelaksanaan Kurikulum Merdeka melalui supervisi, pelatihan, dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Guru perlu meningkatkan kompetensi pedagogik dan profesional, serta memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran agar lebih inovatif dan kontekstual. Sekolah juga disarankan untuk mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada, melakukan evaluasi rutin, dan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman serta berkarakter guna mendukung tercapainya mutu lulusan yang unggul dan berdaya saing.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. (1998). *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*. Boston: Allyn and Bacon.
- Brookfield, S. D. (2017). *Becoming a Critically Reflective Teacher* (2nd ed.). San Francisco: Jossey-Bass.
- Bungin, B. (2010). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Darling-Hammond, L. (2017). *The Right to Learn: A Blueprint for Creating Schools that Work*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Epstein, J. L. (2018). *School, Family, and Community Partnerships: Preparing Educators and Improving Schools* (2nd ed.). New York: Routledge.
- Fullan, M. (2007). *The New Meaning of Educational Change* (4th ed.). New York: Teachers College Press.
- Garrison, D. R., & Vaughan, N. D. (2008). *Blended Learning in Higher Education: Framework, Principles, and Guidelines*. San Francisco: Jossey-Bass.

- Guskey, T. R. (2002). Professional Development and Teacher Change. *Teachers and Teaching: Theory and Practice*, 8(3), 381–391.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (2021). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
- Kemendikbudristek. (2022). *Panduan Implementasi Kurikulum Merdeka*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*. Beverly Hills, CA: Sage Publications.
- Mulyasa, E. (2013). *Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- OECD. (2019). *OECD Learning Compass 2030: A Series of Concept Notes*. Paris: OECD Publishing.
- Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Rahim, F. (2011). *Pengajaran Membaca di Sekolah Dasar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rahman, A. (2021). *Digitalisasi Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan di Sekolah Dasar*. Yogyakarta: Deepublish.
- Riyana, C. (2020). *Inovasi Pembelajaran di Era Digital*. Bandung: UPI Press.
- Sallis, E. (2012). *Total Quality Management in Education* (4th ed.). London: Routledge.
- Sardiman, A. M. (2011). *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suparlan. (2019). *Menjadi Guru Efektif: Strategi Mengembangkan Kompetensi Profesional*. Yogyakarta: Deepublish.
- Suryana, D. (2018). *Stimulasi dan Aspek Perkembangan Anak Usia Dini*. Jakarta: Kencana.
- Suyanto, & Djihad, A. (2013). *Bagaimana Menjadi Guru Profesional*. Yogyakarta: Multi Pressindo.
- Suyitno, I., Haryanti, D., & Rafiqie, M. (2025). *Etika Profesi Keguruan dan Profesionalisme Guru di Era Digital*. Malang: UB Press.
- Thomas, J. W. (2000). *A Review of Research on Project-Based Learning*. San Rafael, CA: Autodesk Foundation.
- Tilaar, H. A. R. (2002). *Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Pedagogik Transformatif untuk Indonesia*. Jakarta: Grasindo.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Wahyudin, D., dkk. (2024). *Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar: Tantangan dan Solusi*. Bandung: UPI Press.
- Wahyudi, A. (2021). *Implementasi Profil Pelajar Pancasila dalam Kurikulum Merdeka*. Yogyakarta: Deepublish.
- Wicaksono, A., & Sari, M. (2023). Efektivitas Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dalam Meningkatkan Karakter Peserta Didik. *Jurnal Pendidikan Dasar Nusantara*, 8(2), 112–126.